

PELAKSANAAN PELATIHAN SEKOLAH DESA DALAM MEMBENTUK KOMPETENSI APARATUR DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO

Ika Imaniyatin

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya
(iimaniyatin@yahoo.com)

Abstrak

Pelatihan merupakan serangkaian pembelajaran dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengembangkan diri yang tidak dibatasi dengan peserta didik yang mengikutinya. Program pelatihan Sekolah Desa IDFoS untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam melaksanakan pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penguasaan kompetensi merupakan aspek utama dan pertama yang harus dimiliki oleh aparatur desa setelah mengikuti proses pelatihan Sekolah Desa IDFoS. Pengetahuan dan keterampilan merupakan fondasi bagi aparatur desa untuk menciptakan pemerintah desa yang maju dan demokratis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara pelaksanaan pelatihan Sekolah Desa IDFoS dengan kompetensi aparatur desa di Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 30 aparatur desa dari Kabupaten Bojonegoro. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data menggunakan rumus product moment untuk menganalisis hasil angket.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa r hitung lebih besar dari r tabel ($0,786 \geq 0,361$) yang artinya terdapat korelasi yang positif antara program pelatihan sekolah desa dan kompetensi aparatur desa. Hubungan antara kedua variabel termasuk dalam kategori kuat karena berada pada interval koefisien $0,60 - 0,799$. Hasil uji signifikan juga menunjukkan bahwa harga t hitung lebih besar dari t tabel ($6,724 \geq 2,048$) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara program pelatihan sekolah desa dengan kompetensi aparatur desa dan kontribusi dari program pelatihan sekolah desa terhadap penguasaan kompetensi aparatur desa adalah 61,77%.

Kata Kunci: Program Pelatihan, Kompetensi Aparatur Desa

Abstrac

Training is a series of learning with the specific purpose to gain the knowledge, skills and attitudes to develop themselves are not restricted to students who followed him. Sekolah Desa IDFoS training program to enhance the knowledge, skills village officials in carrying out the village administration in accordance with Law No. 6 of 2014 concerning the village. Mastery of competencies is a major aspect and the first to be owned by the village officials after attending the training process Sekolah Desa IDFoS. Knowledge and skills are the foundation for village officials to create a village government developed and democratic. The purpose of this study was to determine the correlation between the implementation of the training Sekolah Desa IDFoS competence village officials in Bojonegoro.

This study uses a quantitative approach. The number of respondents in this study is 30 village officials of Bojonegoro. Data collection techniques used were questionnaires, observation and documentation. While the technical data analysis using product moment formula to analyze the results of questionnaires.

The results showed that r count is greater than r table ($0.786 \geq 0.361$), which means that there is a positive correlation between training programs and competency rural schools village officials. The relationship between the two variables included in the strong category because they are at the interval coefficient of 0.60 to 0.799 . Significant test results also show that the price of t is greater than t table ($6.724 \geq 2.048$) so it can be concluded that there is a positive and significant relationship between the training program of village schools with competence village officials. And the contribution of the village school training programs to mastery of competencies village officials is 61.77%.

Keywords: Training Programs, Competence Apparatus Village

PENDAHULUAN

Lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014 menarik perhatian dari berbagai kalangan, tidak terkecuali bagi pemerintah Desa sendiri. Undang-undang No.6 Tahun 2004 tentang Desa telah melahirkan berbagai kewenangan, kewajiban, hak dan tugas dari aparat Desa dan masyarakat Desa dalam mencapai keberhasilan tujuan pembangunan Desa yaitu manusia berkualitas dan sejahtera.

Menurut undang undang no. 6 tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan data dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa, saat ini ada lebih dari 74.093 desa di Indonesia, sehingga bisa diperkirakan seperti apa pengaruhnya bagi perekonomian Indonesia jika semua desa tersebut bisa menjadi desa yang maju dan sejahtera. Namun dari data tersebut ada 32.000 desa dikategorikan sebagai desa yang tertinggal. Oleh karena itu pembangunan desa menjadi bagian penting dalam Undang-Undang Desa. Maka bisa dikatakan bahwa desa adalah unit terkecil dalam tatanan pemerintahan suatu Negara, sehingga kesejahteraan masyarakat desa adalah tolak ukur untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu Negara. Dalam hal ini desa harus dapat menjadi salah satu kunci kekuatan ekonomi Indonesia dan sumber kesejahteraan bagi warganya, baik itu petani, perempuan, masyarakat adat, pemuda-pemudi, anak-anak, kelompok penyandang cacat, dan kelompok masyarakat terasing tanpa terkecuali.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa ini memberikan kesempatan kepada desa untuk menjalankan dan mengatur pembangunannya sendiri, karena masyarakat desa yang lebih tau apa yang dibutuhkan untuk lebih maju dan sejahtera. Semua program pembangunan desa harus

direncanakan oleh pemerintah desa bersama BPD dan masyarakat. Program-program yang akan dilaksanakan harus dimusyawarahkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semua kegiatan di tingkat desa harus dapat direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh masyarakat desa.

Didalam Undang-Undang Desa, desa diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola anggaran desa. Jumlah dana yang diberikan kepada desa rata-rata 1,4 Milyar tiap tahun per desa, dengan alokasi 70% dimanfaatkan untuk pembangunan desa dan 30% untuk gaji dan operasional perangkat desa. Jadi Undang-Undang Desa diberlakukan untuk menguatkan identitas dan jatidiri desa serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi desa untuk mengatur dan mengelola pembangunannya sendiri untuk lebih maju dan sejahtera. Sehingga aparat desa harus siap dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran desa yang cukup besar melalui sebuah program yang efektif dan efisien bagi kesejahteraan masyarakatnya. Namun berdasarkan informasi dilapangan, hingga saat ini masih banyak aparat pemerintah desa yang masih membutuhkan peningkatan kualitas pengetahuan dalam tata kelola pemerintahan desa dan juga pengelolaan anggaran dana desa. Sehingga selama ini program yang dilaksanakan pemerintah desa hanya sekedar untuk menghabiskan dana dan manfaatnya kurang didapat oleh masyarakat. Untuk itu peningkatan kualitas aparat desa merupakan sebuah prioritas untuk menciptakan desa yang sejahtera dan mandiri.

Dalam Undang-Undang Desa telah mengamanatkan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, kearifan local, keberagaman dan partisipatif. Amanat paraturan perundang-undangan ini hanya bisa terwujud apabila aparat pemerintahan desa memiliki kualitas yang memadai.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagian besar diakibatkan oleh terbatasnya informasi, pengetahuan, teknologi, ketrampilan, ditambah oleh kemampuan sumber daya manusia. Dengan demikian perlu adanya dukungan dan dorongan dari berbagai pihak dalam membantu

Pelaksanaan Pelatihan Sekolah Desa Dalam Membentuk Kompetensi

masyarakat pada kondisi tersebut. Sebab, dengan disahkannya Undang-Undang Desa tersebut bila tidak ditunjang dengan kualitas aparatur desa yang memadai bisa menjadi peluang sekaligus ancaman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Disinilah pendidikan nonformal memiliki andil dalam mengatasi permasalahan terkait disahkannya Undang-undang tentang desa. Santoso S. Hamijoyo dalam Marzuki (2010:105) mendefinisikan pendidikan luar sekolah sebagai kegiatan pendidikan yang dilakukan secara terorganisasikan, terencana diluar sistem persekolahan, yang ditujukan kepada individu ataupun kelompok dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dimana tujuan dari pendidikan luar sekolah itu sendiri adalah supaya individu dalam melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan semestinya dan mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Artinya apapun yang dipelajari hendaknya mampu meningkatkan dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia secara nyata dan tidak dijanjikan dalam waktu lama atau yang akan datang.

Jadi jelas bahwa pendidikan non formal berperan sebagai salah satu alternative dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh aparatur desa dalam melaksanakan pemerintahan desa, yang sebagian besar diakibatkan oleh terbatasnya informasi, pengetahuan, teknologi, ketrampilan, ditambah oleh kemampuan sumber daya manusia. Oleh karena itu pendidikan nonformal diharapkan dapat menjembatani permasalahan tersebut terutama dalam merangkul dan menyiapkan aparatur pemerintahan desa. Salah satu program pendidikan nonformal yang dapat berperan merangkul dan menyiapkan aparatur pemerintahan desa adalah program pelatihan.

Sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kemudian berangkat dari realita kapasitas aparatur desa dan amanat peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut, Lembaga IDFoS Bojonegoro merasa perlu untuk berkontribusi dalam pengawalan pelaksanaannya. Diantara bentuk

pengawalan yang dilakukan oleh IDFoS adalah dengan menyiapkan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui penyelenggaraan Sekolah Desa bagi aparatur dan masyarakat Desa di Kabupaten Bojonegoro. Ketersediaan sumberdaya manusia yang handal mutlak adanya untuk mempercepat capaian pembangunan desa. Namun ketersediaan sumberdaya manusia didesa tersebut tidak begitu saja akan ada tanpa dibarengi dengan upaya sistematis untuk mempersiapkannya.

IDFoS sebagai bagian dari elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap tingkat kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bojonegoro, menganggap bahwa capaian kualitas hidup masyarakat hanya dapat dicapai melalui pembangunan desa yang berkualitas dan demokratis, hal ini mengingat bahwa sebagian besar masyarakat adalah berada didesa. Pembentukan desa mandiri dan sejahtera akan bisa terwujud apabila roda pemerintahan di desa dikelola dengan benar. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya wahana strategis penggerak para aparatur desa yang ternyata sampai saat ini belum banyak menguasai arah dan makna Undang-Undang Desa menuju desa mandiri dan sejahtera.

Sekolah Desa merupakan program swadaya IDFoS untuk berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan membentuk kompetensi aparatur desa yaitu meliputi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan perempuan serta pemberdaya Desa, dengan pemberian pelatihan sesuai dengan peran masing masing stakeholder tersebut seperti Advokasi, peningkatan ekonomi, administrasi, pengorganisasian masyarakat, keuangan desa dll.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji sejauh mana penguasaan kompetensi aparatur desa setelah mengikuti program Sekolah Desa angkatan II yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat "IDFoS" menuju desa mandiri dan sejahtera. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Pelatihan Sekolah Desa dalam Membentuk Kompetensi Aparatur Desa di Kabupaten Bojonegoro".

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini diantaranya pertama, bagaimanakah pelaksanaan

program pelatihan Sekolah Desa. Kedua, bagaimana kompetensi aparatur desa setelah ada pelatihan Sekolah Desa, dan ketiga apakah ada hubungan antara pelatihan Sekolah Desa dengan kompetensi aparatur desa.

Berangkat pula dari rumusan masalah diatas peneliti memiliki tujuan yang dimana tujuan tersebut antara lain pertama, untuk mengetahui pelaksanaan program pelatihan Sekolah Desa. Kedua, untuk mengetahui kompetensi aparatur desa setelah ada pelatihan Sekolah Desa. Sedangkan ketiga, untuk mengetahui hubungan antara pelatihan Sekolah Desa dengan kompetensi aparatur desa.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:14), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian korelasi, penelitian korelasi adalah penelitian yang berusaha mengetahui bagaimana dua variabel atau lebih berhubungan. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan derajat hubungan korelasi antara dua variabel yaitu pelaksanaan pelatihan Sekolah Desa dan Kompetensi aparatur desa yang dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik yang berjumlah 30 orang dari 12 desa di Kabupaten Bojonegoro yang mengikuti Sekolah Desa. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *area sampling*, dimana peneliti mengambil sampel dengan memilih berdasarkan jumlah desa yang mengikuti dari tiap wilayah bagian timur, barat, selatan, utara di Kabupaten Bojonegoro. Adapun jumlah peserta pelatihan Sekolah Desa keseluruhan yaitu 99 orang dari 33 Desa di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian peserta pelatihan tersebut dibagi atas wilayah Bojonegoro barat, timur, utara dan selatan. Sehingga dengan data tersebut maka dapat diambil populasi penelitian

dengan perbandingan desa yang diambil yaitu 4 : 1 : 2 : 5 yaitu dari wilayah Barat ada 4 desa, wilayah utara ada 1 desa, wilayah selatan ada 2 desa dan wilayah timur diambil 5 desa sebagai responden di wilayah kabupaten Bojonegoro.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain yang pertama melalui angket tertutup yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih, kedua peneliti menggunakan observasi langsung karena peneliti melakukan penelitian ke tempat pelaksanaan program dan ketiga peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu untuk memperoleh data-data yang berbentuk tulisan, misalnya data tentang profil lembaga IDFoS Bojonegoro, biodata peserta didik, daftar nama tutor, sarana prasarana, jadwal pembelajaran dan foto kegiatan pelatihan Sekolah Desa.

Menurut Hasan (2006: 24), pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah (1) Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument, untuk mengukur tingkat validitas dari instrument peneliti menggunakan rumus *Product Moment*. (2) Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan , tingkat keakuratan, kestabilan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik belah dua (*split half*) dengan menggunakan rumus *spearman brown*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kuantitatif. Karena datanya kuantitatif, maka teknik analisis data yang digunakan metode statistic yang sudah tersedia. Dengan demikian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) Uji hipotesis (2) Uji normalitas dan (3) Uji korelasi dengan rumus korelasi product moment.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara pelaksanaan pelatihan sekolah desa dan seberapa besar penguasaan kompetensi aparatur desa dikabupaten Bojonegoro. Pada pembahasan ini

Pelaksanaan Pelatihan Sekolah Desa Dalam Membentuk Kompetensi

akan dipaparkan hasil analisis data angket yang telah disebar kepada responden.

Pelaksanaan pelatihan sekolah desa di kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan sebanyak dua kali, untuk angkatan I dilaksanakan di Wisma Toyo Aji desa Wedi Kabupaten Bojonegoro dan untuk angkatan II dilaksanakan di Hotel Layung Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dengan peserta pelatihan yaitu aparatur pemerintah desa dari 33 desa di Kabupaten Bojonegoro. Peserta didik yang telah mengikuti pelatihan sekolah desa mampu mengelola pemerintahan desa dan pembangunan desa dengan lebih baik serta terampil dalam menyelesaikan pekerjaan dan juga pelayanan pada warga desa. Dalam penelitian ini peneliti mengambil populasi sebanyak 30 orang yang telah mengikuti program pelatihan sekolah desa yang berada di Bojonegoro bagian Timur, Bojonegoro Barat, Bojonegoro Selatan dan Bojonegoro Utara.

Pelatihan sekolah desa tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik maupun pihak Institute Development of Society (IDFoS) Bojonegoro. Berdasarkan data angket yang telah disebar oleh peneliti tentang pelaksanaan pelatihan sekolah desa dengan indikator penelitian diantaranya, yaitu: 1) pengorganisasian peserta didik, 2) pengorganisasian tujuan dan bahan ajar, 3) metode pembelajaran, 4) alokasi waktu, 5) dana belajar, 6) tempat belajar dan sarana prasarana, 7) alat dan media pembelajaran, 8) sumber belajar, 9) iklim sosial atau suasana pembelajaran, 10) evaluasi. Memperoleh hasil perhitungan rata-rata (mean) sebesar 106,87 setelah itu dikontribusikan dengan tabel distribusi bahwa 106,87 pada kategori baik. Artinya adalah pelaksanaan pelatihan sekolah desa di kabupaten Bojonegoro baik.

Selanjutnya pada penyebaran angket kompetensi aparatur desa dengan indikator, yaitu: 1) pengetahuan, 2) keterampilan, 3) sikap diperoleh hasil perhitungan rata-rata mean 113,47 dan setelah dikontribusikan dengan tabel distribusi bahwa 113,47 masuk pada kategori baik. Artinya penguasaan kompetensi aparatur desa tersebut berkategori baik dikarenakan materi-materi yang diberikan dalam pelatihan sangat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan aparatur desa serta adanya keberlanjutan atau asistensi yang dilaksanakan oleh pihak IDFoS kepada peserta sehingga penguasaan

kompetensi yang dimiliki peserta pelatihan ini tinggi.

Dari hipotesis yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu ada korelasi antara pelaksanaan pelatihan sekolah desa dan penguasaan kompetensi aparatur desa di kabupaten Bojonegoro (H_a) dan tidak ada korelasi antara pelaksanaan pelatihan sekolah desa dan penguasaan kompetensi aparatur desa di kabupaten Bojonegoro (H_o).

Berdasarkan uji statistic yang telah dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan pelatihan sekolah desa memiliki korelasi yang positif dengan penguasaan kompetensi aparatur desa yang ditunjukkan dengan r hitung lebih besar dari r tabel ($0,786 \geq 0,361$). Hubungan positif yang dimaksud adalah jika pelaksanaan pelatihan sekolah desa dilaksanakan dengan baik dan peserta mengikuti pelatihan dengan serius, maka penguasaan kompetensi akan tinggi. Sebaliknya jika pelaksanaannya kurang baik dan peserta tidak serius dalam mengikuti pelatihan maka penguasaan kompetensi semakin rendah.

Dari tabel pedoman untuk menginterpretasikan koefisien korelasi dapat dilihat bahwa pelatihan sekolah desa memiliki hubungan yang kuat dengan kompetensi aparatur desa di Kabupaten Bojonegoro karena berada pada interval koefisien $0,60 - 0,799$. Hal ini berarti H_o yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang positif antara pelaksanaan pelatihan sekolah desa dengan kompetensi aparatur desa di Kabupaten Bojonegoro ditolak dan H_a diterima. Hasil uji signifikan juga menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari pada t tabel ($6,724 \geq 2,048$) yang berarti terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara pelaksanaan pelatihan sekolah desa dengan penguasaan kompetensi aparatur desa di Kabupaten Bojonegoro.

Meskipun hipotesis telah terjawab, namun pada penelitian ini program pelatihan sekolah desa memberikan kontribusi sebesar 61,77% terhadap penguasaan kompetensi aparatur desa di Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan 38,23% merupakan kompetensi awal atau pengalaman yang sudah dimiliki oleh peserta pelatihan sekolah desa. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin baik pelaksanaan pelatihan dan semakin serius peserta mengikuti pelatihan sekolah desa maka semakin tinggi penguasaan kompetensi aparatur desa di Kabupaten Bojonegoro.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun pada bab IV, maka simpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah terdapat korelasi yang positif antara pelaksanaan pelatihan sekolah desa dengan kompetensi aparatur desa di Kabupaten Bojonegoro ditunjukkan dengan harga r hitung lebih besar dari r tabel ($0,786 \geq 0,361$). Hubungan antara kedua variabel termasuk dalam kategori kuat karena berada pada interval koefisien $0,60 - 0,799$. Hasil uji signifikan juga menunjukkan bahwa harga t hitung lebih besar dari t tabel ($6,724 \geq 2,048$) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pelaksanaan pelatihan sekolah desa dengan kompetensi aparatur desa.

Pelaksanaan pelatihan sekolah desa memberikan kontribusi sebesar 61,77% terhadap penguasaan kompetensi aparatur desa di Kabupaten Bojonegoro yang termasuk dalam desain penelitian ini dan untuk 38,23 % sisanya merupakan kompetensi awal atau pengalaman yang sudah dimiliki oleh peserta pelatihan Sekolah Desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran untuk pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut:

1. Pada penyelenggara program pelatihan sekolah desa lebih dioptimalkan lagi tingkat kehadiran dan alokasi waktu dalam penyampaian materi agar tujuan dari pelatihan dapat tercapai dengan baik.
2. Penguasaan kompetensi aparatur desa yang mengikuti pelatihan sekolah desa termasuk dalam kategori baik, pada kesempatan selanjutnya penyelenggaraan program pelatihan sekolah desa dapat lebih di optimalkan lagi agar penguasaan kompetensi aparatur desa semakin meningkat.
3. Bagi peneliti lain, mengungkapkan lebih detail tentang variabel lain yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan sekolah desa dan kompetensi aparatur desa di Kabupaten Boonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rozaki dan Sutoro Eko, (ed). 2005. *Prakarsa Desentralisasi Dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE press.
- Anwar. 2004. *Pendidikan Kecakapan Hidup*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Enojo, Audu. dkk. 2016. European Journal of Training and Development Studies: Training And Development In Lokoja Local Government Council Kogi State, Nigeria 2003-2009, (online), Vol.3, No.2, pp: hal 50, (<http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/Training.pdf>, diunduh pada 24 Juni 2016).
- Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitian dengan Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hwa ko, Wen. 2015. International Journal of Hospitality Management: Constructing a professional competence scale for foodservice research & development employees from an industry viewpoint, (online), vol 49: hal 67, (<http://ac.els-cdn.com/>, diunduh pada 23 Juni 2016).
- Kamil, Mustofa. 2010. *Model Pendidikan dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Marzuki, Saleh. 2010. *Pendidikan Nonformal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyasa. 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT Remaja Rosdaya
- Musfah, Jejen. 2011. *Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan sumber belajar teori dan praktek*. Jakarta: Kencana.
- Posuma, O Christilia. 2013. "Kompetensi, Kompensasi, dan Kepemimpinan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan pads Rumah Sakit Ratumbuang Manado". *Jurnal Emba*. Vol.1 (4): hal 646-656.
- Riyanto, Yatim. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: Unesa University Press
- Setyaningdiyah, E. dkk.2013. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business: The Effect of Human Resource Competence, Organisational Commitmen and Transactional Leadership on Work Discipline, Job Satisfaction and Employee's*

Pelaksanaan Pelatihan Sekolah Desa Dalam Membentuk Kompetensi

- Performance, (online), Vol 5 (4): hal 140-153, (<http://journal-archives35.webs.com/140-153.pdf>, diakses pada 03 marel 2016).
- Simandjuntak, Pasaribu. 1986. *Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Tarsito.
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sudjana, Djuju. 2004b. *Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat & Teori Pendukung, serta Asas*. Bandung: Falah Production.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Diakses pada tanggal 13 Januari 2016 pukul 14.13 WIB.
- Wahyu, Made Suthedja.1981. *Manajemen Pembangunan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Edisi ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada.
- www.idfos.or.id
- www.bojonegorokab.go.id

